

STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Rieco Prima Saenegara¹, Sudiyono², Abdul Hamid³

**¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NPM16810316**

**²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIP/NIK061.804.1081**

**³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIDN1118097201**

E-mail : riecoprimas@gmail.com

ABSTRAK

Bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung khususnya bangunan rumah tinggal, ruko dan lain sebagainya yang luas bangunannya kurang lebih 50 meterakan suatu izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai wujud dari kepastian hukum bagi pemilik dan bangunan yang membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi bangunan gedung. Bagi warga masyarakat kecamatan Banjarbaru Selatan IMB akan diterbitkan oleh Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan apabila luas bangunannya kurang lebih 50 meter serta telah memenuhi persyaratan administrasinya dan persyaratan teknis. Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan penerbitan IMB dan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan berhak untuk menolak penerbitan IMB sampai persaratan lengkap dan dapat diterima. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB di kecamatan Banjarbaru Selatan, dan bagaimana pelaksanaan penegak hukum oleh pemerintah daerah kecamatan Banjarbaru Selatan bagi bangunan yang tidak memiliki IMB. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kuantitatif. Populasi penelitian adalah rekapitulasi jumlah IMB dikecamatan Banjarbaru Selatan mulai tahun 2019 sampai dengan januari 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan seleksi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode yuridis kualitatif secara deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran penegak hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk kawasan kecamatan Banjarbaru Selatan yakni Dinas kecamatan Banjarbaru Selatan dan Satpol PP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terbilang masih belum efektif karena belum ada penindakan tegas dari penegak hukum terkait pemilik bangunan tidak memiliki IMB. Salah satu faktor yang menjadi kurang maksimalnya kinerja penegak hukum adalah kurangnya kerja sama yang baik dalam menjalankan peraturan perundang-undangan baik dari Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan Maupun Satpol PP kota Banjarbaru.

Kata Kunci : perizinan, izin mendirikan bangunan(IMB), sanksi

ABSTRACT

Owners or users of buildings, especially residential buildings, shop house, and so forth with a building area of approximately 50 meters will be a building permits a form of legal certainty for owners and buildings constructing new buildings, change ,expand, reduce buildings.For residents of the Banjarbaru Selatan sub-district, the IMB will be issued by the South Banjarbaru District Service if the building area is approximately 50 meters and has met the administrative requirements and technical requirements. Every person or entity that applies for the issuance of IMB and does not meet the administrative requirements Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan berhak untuk menolak penerbitan IMB sampai persyaratan lengkap dan dapat diterima.This research is focused on two problem formulations, namely how the legal responsibility for building owners who do not have a IMB in South Banjarbaru sub-district, and how law enforcement is implemented by the local government of South Banjarbaru sub-district for buildings that do not have a IMB.This research is an empirical research, which is quantitative in nature. The study population was a recapitulation of the number of IMB in South Banjarbaru sub-district from 2019 to January 2020. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection techniques used interview and documentation techniques, which were then processed using editing, classification and data selection techniques. The data obtained in this study were analyzed using qualitative juridical descriptive methods. From this study, it was found that the role of law enforcement that was carried out by the local government for the South Banjarbaru sub-district, namely the South Banjarbaru sub-district and the Banjarbaru municipal Satpol PP in implementing statutory regulations was still ineffective because there had been no firm action from law enforcers regarding building owners not. has an IMB. One of the factors that has reduced the performance of law enforcers is the lack of good cooperation in carrying out the laws and regulations both from the Banjarbaru Selatan Subdistrict Office and the Banjarbaru Municipal Satpol PP.

Keywords : permits, building construction permits (IMB), penalty

untuk membantu pemerintah dalam hal menertibkan menata tata ruang kota dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Hendaknya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban bangunan lebih ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif terhadap pemilik bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan di kecamatan Banjarbaru selatan. Terutama bagi bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan untuk diberisanksi yang tegas sesuai peraturan daerah yang berlaku. Dan melakukan kegiatan sosialisasi dari aparat peraturan daerah maupun penegak hukum daerah dalam memberikan informasi terkait pentingnya bangunan memiliki IMB kepada masyarakat Kecamatan Banjarbaru Selatan.

REFERENSI

BUKU

- Adrian Sutedi,(2011)*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana,(2018), *pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk.Pertama, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ,(2003),*Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- CholidNarkubo dan Abu Achmadi,(2005),*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.BumiAksara,
- MarihotPahala Siahaa, (2008),*Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, RajaGrafindoPersada, Jakarta
- Masri Singarimbun dan Sofan Efendi,(2008) *Metode Penelitian Survei* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'matul Huda,(2010), *Problem Pembatalan Peraturan Daerah*, Ctk.Pertama, Yogyakarta : FH UII Press
- Philipus M. Hadjon, (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika
- Ridwan,(2014), *Direksi & Tanggung Jawab* , Ctk. Pertama, Yogyakarta : FH UII Press
- Sumadi Suryabrata, (1987), *Metode Penelitian* Ctk.Pertama, Jakarta : Rajawali
- Y.Sri Pudyatmoko, (2009), *Perizinan Problem dan upaya Pembenahan*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT.Grasindo
- S.F. Marbun,(2018), *Hukum Adminstrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, Yogyakarta : FH UII Press

JURNAL :

- M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan metode purposive sampling, 30 Maret 2017, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html> , diakses online pada tanggal 28 juli 2020
- Reza Dwi Syahputra, Penegak Hukum Bagi Bangunan Net City Yang Tidak Memiliki IMB, 2018, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11304/SKRIPSI_REZA%20DWI%20SYAHPUTRA_14410623.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 28 Juli 2020

INTERNET :

- Hukum Online.com : “Sanksi Hukum Jika Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diakses online pada, ”<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-mendirikan-bangunan/>, diakses pada tanggal 8 maret 2020
- Maxmanroe.com, Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis Data, dapat diakses online pada, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> , diakses pada tanggal 30 juli 2020
- Media.neliti.com, Penegak Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, dapat diakses online pada, <https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>, diakses tanggal 30 Juli 2020
- Republika.co.id : “Tidak memiliki IMB, 168 Bangunan di Bojonggede Diterbitkan” dapat diakses online pada, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/11/30/p088g6415-tidak-memiliki-imb-168-bangunan-di-bojonggede-ditertibkan>, diakses tanggal 8 maret 2020
- Repository.unpas,BAB I Pendahuluan, dapat diakses online pada, <http://repository.unpas.ac.id/2239/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 30 juli 2020
- TipsSerbaSerbi, Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, dapat diakses online pada,[https:// tipsserbaser bi.blogspot.com/2015/06/makna-alinea-keempat-pembukaan-uud-1945.html](https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/makna-alinea-keempat-pembukaan-uud-1945.html), diakses tanggal 29 Juli 2020
- Wikipedia, Pemerintah Daerah di Indonesia, dapat diakses online pada, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses tanggal 28 Juli 2020
- Walisongo,Jenis dan Sumber Data, dapat diakses online pada, http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf , diakses pada tanggal 30 juli 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN ;

- Undang-Undang Dasar Tahun Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Perwali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Banjarbaru.